



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI WILAYAH  
TAPAL KUDA DAN PULAU MADURA PROVINSI JAWA  
TIMUR TAHUN 2011-2014**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Aisyah Ayu Rahmanillah  
NIM 130810101175**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI WILAYAH  
TAPAL KUDA DAN PULAU MADURA PROVINSI JAWA  
TIMUR TAHUN 2011-2014**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh :**

**Aisyah Ayu Rahmanillah  
130810101175**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan pujiyukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ayah Hariadi Yuswanto dan Ibu Indah Isna Kartini yang selalu memberikan kasih sayang, doa yang tak pernah henti, dan semangat yang mambuat saya menjadi seperti ini.
2. Kakak-Kakak saya yang tersayang, Sari Putri Joeswhindah Dan Dhiajeng Izzah Arum Sari yang tidak ada henti-hentinya memberikan dukungan.
3. Bapak/ ibu guru saya sejak TK hingga saat ini saya di perguruan tinggi yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu yang tak henti – henti.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Motto**

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya”.

(Al-Baqarah [2] : 45-46)\*\*

"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri." (Benyamin Franklin)\*

“Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu”.

(Ali Bin Abi Thalib)\*\*\*

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aisyah Ayu Rahmanillah

Nim : 130810101175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI WILAYAH TAPAL KUDA DAN PULAU MADURA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2014” adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah di ajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas ke absahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2017

Yang menyatakan,

Aisyah Ayu Rahmanillah

NIM 130810101175

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI WILAYAH TAPAL KUDA DAN  
PULAU MADURA PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2011-2014**

Oleh :

Aisyah Ayu Rahmanilla

NIM 130810101175

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Nanik Istiyani, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Anifatul Hanim, M.Si

**TANDA PERESETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks  
Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah Tapal  
Kuda Dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2011-2014  
Nama : Aisyah Ayu Rahmanillah  
Nim : 130810101175  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Tanggal Persetujuan : 19 September 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani M.Si  
NIP.196101211987022002

Dra. Anifatul Hanim, M.Si  
NIP.196507301991032001

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 196411081989022001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI WILAYAH TAPAL KUDA DAN  
PULAU MADURA PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2011-2014**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Aisyah Ayu Rahmanillah

Nim : 130810101175

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

27 Oktober 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Moehammad Fathorrazi, M. Si (.....)  
NIP. 19630614 199002 1 001
2. Sekretaris : Duwi Yunitasari, SE, M.E (.....)  
NIP. 19780616 200312 2 001
3. Anggota : Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes (.....)  
NIP. 19641108 198902 2 001



Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. M. Miqdad, SE, MM,Ak

NIP. 19710727199521001

*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kawasan Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014*

**Aisyah Ayu Rahmanillah**

**Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember**

#### **ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang dewasa ini dapat didorong dengan upaya pembangunan manusia, dimana pembangunan manusia dapat terlihat dari tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara. Dalam pelaksanaan pembangunan, peran pemerintah mutlak dibutuhkan, dalam penelitian ini peran pemerintah berupa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura tahun 2011-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara simultan memiliki pengaruh terhadap IPM di wilayah penelitian. Hasil uji parsial menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini dikarenakan adanya kelemahan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan 4 (empat) tahun penelitian, sedangkan untuk meneliti pengaruh dari adanya investasi di sektor pendidikan dibutuhkan waktu yang lama, selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menyarankan agar pemerintah terus menerus meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan dan diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanannya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM, dan pemerintah harus lebih giat berusaha untuk merangkul masyarakat agar bersukarela ikut serta dalam proses pembangunan, karena masyarakat merupakan agen-agen aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

*Kata Kunci: pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, indeks pembangunan manusia(IPM)*

*The Effect of Government Expenditure on Human Development Index (HDI) In the Tapal Kuda Region and Madura Island of East Java Province  
On year 2011-2014*

**Aisyah Ayu Rahmanillah**

**Department of Economics and Development Study, Economics and  
Business Faculty, Jember University**

**ABSTRACT**

The long-term of economic growth can be push by human development efforts, where human development can be seen from the level of quality of human life in every country. In the implementation of development, the role of government is absolutely necessary, in this research the role of government in the form of government spending on education sector, health and infrastructure. The purpose of this research is to knowing the development of the effect of government spending on the education, health and infrastructure sectors on the human development index in the Tapal Kuda Region and Madura Island on 2011-2014. The results of this research showed that government spending on the education, health and infrastructure sectors simultaneously have an impact on HDI in the research area. The result of partial test showed that government education expenditure variables has do not affect on Human Development Index (HDI), this is caused by weakness in this research that only use 4 (four) years of research, and the variable of government expenditure of health and infrastructure sectors have positive and significant effect on Human Development Index (HDI). This research suggests that the government continuously improves the allocation of funds for development and it is hoped afford to improve the quality of services which eventually will improve the quality of human resources, and the government should be more aggressive to embrace the community to volunteer to participate in the development process, because the community is active agents in the implementation of national development.

*Keywords: government spending on education, health and infrastructure sectors, human development index(HDI)*

## RINGKASAN

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah Tapal Kuda Dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014:** Aisyah Ayu Rahmanillah,1308101011752017: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang dewasa ini dapat didorong dengan upaya pembangunan manusia, dimana pembangunan manusia dapat terlihat dari tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pelaksanaan pembangunan, peran pemerintah mutlak dibutuhkan, dalam penelitian ini peran pemerintah berupa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, (2) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, (3) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur.

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh Kabupaten di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur dengan waktu penelitian tahun 2011 – 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari IPM yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Pusat Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jederal Perimbangan Keuangan, dengan Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan *evIEWS9*.

Dalam meningkatkan kualitas SDM peneliti menggunakan tiga variabel yaitu : (1) Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, (2) Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Dan (3) Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan secara uji parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tidak dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Peneliti jugamenggunakanujiasumsiklasik, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan dalam penelitian ini, yaitu minimnya tahun penelitian yang dilakukan dari tahun 2011 hingga tahun 2014, lama tahun penelitian ini kurang dapat mencerminkan pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan infrastruktur sejauh ini terbukti secara gamblang mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga pemerintah diharapkan terus menjaga kualitas pelayanannya dikedua sektor tersebut melalui peningkatan alokasi dana untuk pembangunan di sektor kesehatan dan infrastruktur.

## PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Wilayah Tapal Kuda Dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014” Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, bantuan berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, materi dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Anifatul Hanim M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk membimbing, memberikan motivasi, saran dan kritik serta pengarahan terhadap penulis;
2. Bapak Dr. M. Miqdad, SE, MM, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan penelitian ini;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, SE, M.Kes. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan penelitian ini dan motivasi;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;

5. Kedua orang tua saya, ayah Hariadi Yuswanto dan ibu Indah Isna Kartini terimakasih yang tak terhingga atas doa, dukungan, motivasi , kerja keras, kesabaran dan kasih sayang selama ini;
6. Kakak-kakak saya yang tersayang, Sari Putri Joeswhindah dan Dhiajeng Izzah Arum Sari yang tidak ada henti-hentinya memberikan dukungan finansial;
7. Sahabat saya Coniq Putri Andinata, Wihartanti Sulistyaning Tyas, Noviana Dwi Haryati dan Reni Dwi Puspitasari yang selalu mensupport dan memberikan saran kepada penulis;
8. Sahabat saya Yuniar Putri Andaru, Cicilia Abiyadati, Teana dan kakak Eva Rosana Banjarnahor yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis;
9. Sahabat perjuangan M. Fariz Alqodri dan Julio Dwi Surya A., yang selalu setia menemani hari-hari penulis;
10. Teman-teman kos mastrip A12 yang selalu memberikan perhatian untuk hari-hari penulis;
11. Seluruh teman-teman IESP angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu, yang selalu memberikan berita terbaru mengenai kampus, terimakasih atas bantuan dan supportnya;

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis amat di harapkan bagi penyempurnaaan tugas akhir ini.Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dam tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.Amien.

Jember, 19 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING .....	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN PENGESAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Peranan Modal Dalam Pertumbuhan Ekonomi .....	9
2.1.2 Teori Modal Manusia ( <i>Human Capital</i> ).....	11
2.1.3 Konsep Pembangunan Manusia .....	12
2.1.4 Konsep Indeks Pembangunan Manusia.....	14
2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia .....	17

2.1.6 Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi.....	18
2.1.7 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dalam Pembangunan.....	21
2.1.8 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dalam Pembangunan.....	22
2.1.9 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Dalam Pembangunan.....	23
<b>2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya .....</b>	<b>24</b>
<b>2.4 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>29</b>
<b>2.5 Hipotesis .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Rancangan Penelitian .....</b>	<b>32</b>
3.1.1 Jenis Penelitian.....	32
3.1.2 Unit Analisis.....	32
3.1.3 Jenis Dan Sumber Data .....	32
<b>3.2 Metode Analisis .....</b>	<b>33</b>
3.2.1 Analisis Regresi Data Panel .....	33
3.2.2 Uji Penentuan Model.....	36
3.2.3 Uji Statistik.....	37
3.2.4 Uji Asumsi Klasik .....	40
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>4.1 Gambaran Umum .....</b>	<b>44</b>
4.1.1 Aspek Geografis Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura .....	44
4.1.2 Aspek Demografi Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura.....	48
4.1.3 Aspek Ekonomi Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura .....	49
<b>4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian.....</b>	<b>51</b>
4.2.1 Indeks Pemabangunan Manusia (IPM). .....	51
4.2.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan .....	52
4.2.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	54
4.2.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur .....	55
<b>4.3 Analisis Data .....</b>	<b>56</b>

4.3.1 Pengujian Model Regresi Data Panel.....	56
4.3.2 Analisis Regresi Data Panel .....	57
4.3.3 Uji Statistik.....	58
4.3.4 Uji Asumsi Klasik .....	61
<b>4.4 Pembahasan .....</b>	<b>64</b>
4.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	65
4.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	66
4.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	67
<b>BAB 5. Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR TABEL**

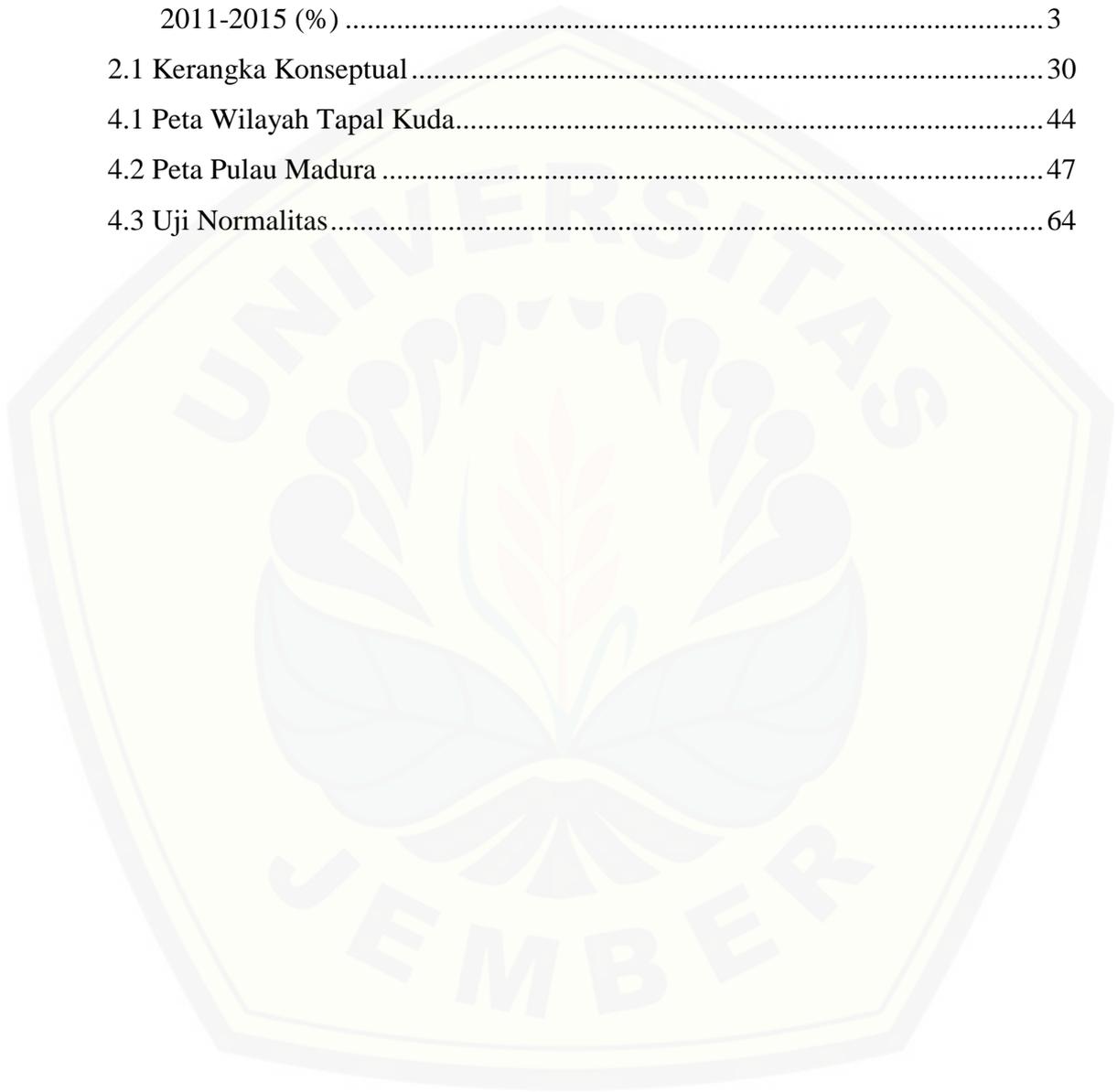
Tabel

1.1	Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2014 .....	6
2.1	Tinjauan Penelitian Sebelumnya .....	27
4.1	Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura (Ribuan Jiwa) .....	49
4.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura (Milyar Rupiah) .....	50
4.3	Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura (persen) .....	51
4.4	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Jutaan Rupiah) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura .....	53
4.5	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Jutaan Rupiah) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura. ....	54
4.6	Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (Jutaan Rupiah) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura. ....	55
4.7	Hasil Uji Hausman .....	56
4.8	Hasil Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan <i>Random Effect</i> ...	57
4.9	Uji F.....	59
4.10	Uji t.....	60
4.11	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	61
4.12	Uji Multikolinearitas .....	62
4.13	Uji Heteroskedastisitas .....	63

**DAFTAR GAMBAR**

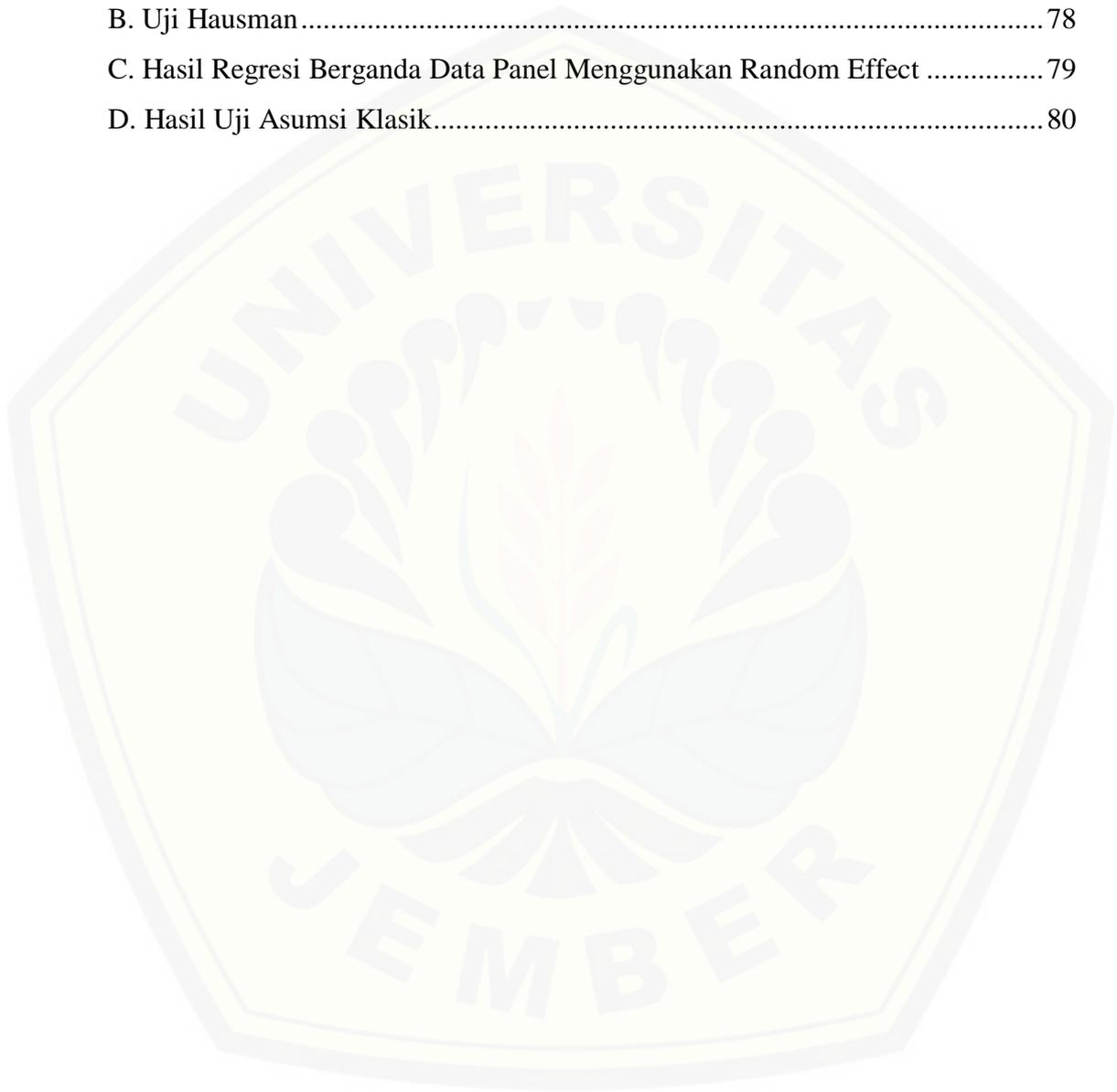
Gambar

1.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di P. Jawa dan Indonesia pada tahun 2011-2015 (%) .....	3
2.1 Kerangka Konseptual .....	30
4.1 Peta Wilayah Tapal Kuda.....	44
4.2 Peta Pulau Madura .....	47
4.3 Uji Normalitas.....	64



**DAFTAR LAMPIRAN**

A. Data Penelitian .....	76
B. Uji Hausman.....	78
C. Hasil Regresi Berganda Data Panel Menggunakan Random Effect .....	79
D. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	80



## BAB 1 PENDAHULUAN

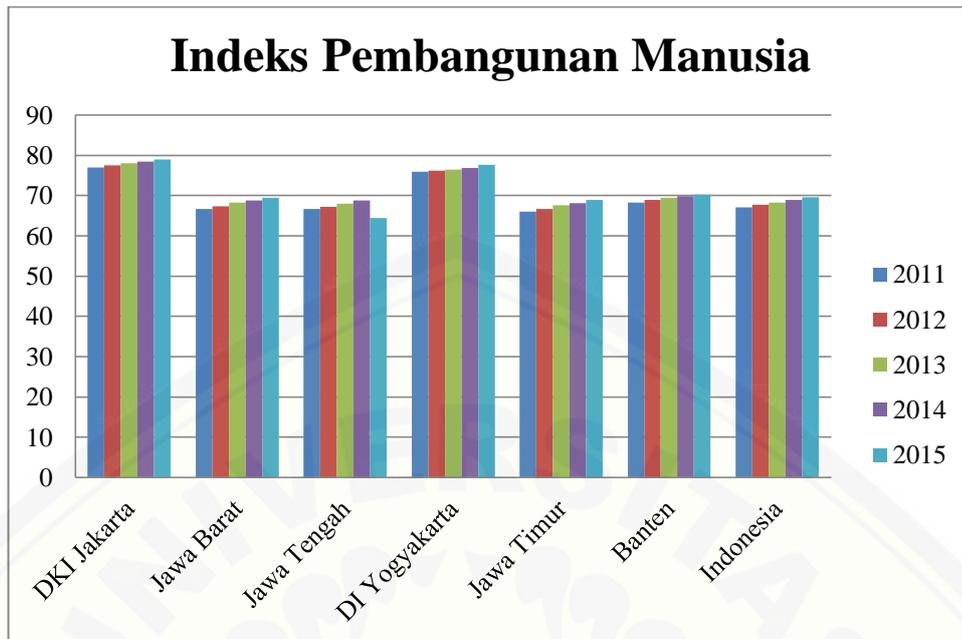
### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu gambaran yang dapat menjelaskan keberhasilan pembangunan suatu negara. Teori Klasik menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang turut ditentukan oleh peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia. Sudah diketahui bahwa akumulasi modal menjadi hal utama dalam pertumbuhan ekonomi. Romer dan Lucas mencetuskan teori pertumbuhan baru, yang mana mendefinisikan modal/kapital diperluas dengan menambahkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia (Putra, 2015:33). Modal sumber daya manusia merupakan bagian dari paradigma pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dimana pembangunan manusia dapat terlihat dari tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara (Winarti, 2014:1).

Pembangunan manusia perlu mendapat perhatian karena permasalahan-permasalahan utama yang terjadi dalam sebuah negara yaitu permasalahan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan lain-lain. Sumber daya alam bukanlah jaminan sebuah negara dikatakan maju atau berkembang, karena subyek pembangunan adalah manusia bukan alam. Sebagai contoh Singapura dan Indonesia, keduanya merupakan Negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara. Singapura merupakan negara miskin Sumber Daya Alam (SDA) tetapi menjadi 15 besar negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi (*high level*) dan masuk ke dalam kategori Negara Maju (NM), dibandingkan dengan Indonesia negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), dengan tingkat IPM yang jauh di bawah Singapura dan Indonesia merupakan Negara Berkembang (NB), sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas manusia yang tinggi dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada dengan efektif dan efisien, hal ini membuktikan bahwa pembangunan manusia lah yang patut mendapat perhatian di dalam pelaksanaan pembangunan, secara eksplisit hal ini dipaparkan oleh Lucas dan Romer dalam teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*).

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terakhir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga (Lumbatoruan, 2012). Pembangunan manusia merupakan indikator dari keberhasilan suatu pembangunan ekonomi suatu negara, karena suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya (Arifin, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dimana mencakup tiga dimensi dasar, meliputi kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Untuk dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, untuk dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan yang terakhir dimensi standar hidup layak menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak, tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2011-2015

Gambar 1.1: Grafik Indeks Pembangunan Manusia di P. Jawa dan Indonesia pada tahun 2011-2015 (%)

Gambar 1.1, menunjukkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang selalu mengalami fluktuasi, meskipun naik turunnya tidak terlalu tinggi, tapi persentase tersebut menjelaskan keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun. Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dimana menjadi pulau terluas ke-13 di dunia, dan memiliki penduduk yang padat, dapat dilihat bahwa 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Berbicara mengenai tingkat IPM pulau Jawa, Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki persentase tingkat IPM paling rendah diantara lima wilayah lain, yaitu pada tahun 2011 tingkat IPM provinsi Jawa Timur sebesar 66,06%, dibanding dengan tingkat IPM DKI Jakarta pada tahun yang sama sebesar 76,98%, perbedaan ini memang tidak terlalu jauh, tetapi cukup jelas dalam menggambarkan perbedaan kondisi sumber daya manusia (SDM) di kedua wilayah tersebut.

Perbandingan tingkat IPM antara Provinsi Jawa Timur dengan Indonesia, dimana besaran persentase keduanya tidak terpaut terlalu jauh. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 tingkat IPM Jawa Timur berada di bawah tingkat IPM Indonesia, sedangkan pada tahun 2014, Jawa Timur mengalami peningkatan

tingkat IPM menjadi sebesar 68,14%, jumlah ini lebih besar 0,5% dibanding dengan tingkat IPM Indonesia pada tahun yang sama yaitu sebesar 68,9%, perbedaan tersebut tidak menggambarkan perbedaan kondisi sumber daya manusia (SDM) yang signifikan. Pada tahun 2015, tingkat IPM Indonesia kembali lebih unggul dari tingkat IPM Jawa Timur, dimana secara berurutan besarnya tingkat IPM di Indonesia dan Jawa Timur mencapai 69,55% dan 68,95%.

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) telah melakukan analisis pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur, dimana menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan peningkatan layanan pendidikan melalui penambahan gedung sekolah, perbaikan sarana dan prasarana serta memberikan bantuan dalam program pendidikan, tetapi walaupun upaya tersebut terus ditingkatkan beberapa indikator pendidikan di Jawa Timur belum menunjukkan kinerja yang optimal. Berbeda dengan hasil pembangunan bidang pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik, dilihat dari indikator kesehatan meliputi angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk yang berada di bawah nasional. Dalam bidang kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Timur, salah satunya dengan cara peningkatan layanan baik berupa sarana maupun prasarana kesehatan (Bappenas, 2015:8-9). Pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari penilaian kualitas hidup manusia.

Sukirno dalam Larassita (2016: 1) menjelaskan bahwa investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan investasi diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama yang berorientasi pada pembangunan manusianya. Investasi yang dimaksud dapat berupa pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dimana pengeluaran pemerintah adalah bentuk intervensi pemerintah dalam mencapai kondisi pertumbuhan ekonomi yang diinginkan suatu negara. Suparmoko (1996) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang, dimana diharapkan terwujudnya kesejahteraan bagi

masyarakat. Menurut Meier dan Rauch dalam Winarti (2014:54) suatu bangsa harus memiliki tingkat investasi yang tinggi dalam bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai standar ekonomi dan kehidupan bangsa yang lebih baik. Tidak hanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan saja yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dimana infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung proses pertumbuhan ekonomi, infrastruktur juga sebagai gambaran pemerataan pembangunan yang terjadi (Larassita, 2016:23).

Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten dan Kota, dimana terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Banyaknya jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, masing-masing kabupaten memiliki kondisi sumber daya manusia (SDM) yang berbeda-beda, perbedaan tersebut dapat tergambarkan dengan tingkat IPM Provinsi Jawa Timur per Kabupaten/Kota pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2014

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Kota Malang	77,36	78,04	78,44	78,96
Kota Surabaya	77,62	78,05	78,51	78,87
Kota Madiun	76,48	77,21	78,41	78,81
Sidoarjo	74,48	75,14	76,39	76,78
Kota Blitar	73,08	73,53	74,53	75,26
Kota Mojokerto	73,47	74,2	74,91	75,04
Kota Kediri	72,93	73,66	74,18	74,62
Kota Pasuruan	70,41	72,01	72,89	73,23
Gresik	71,11	72,12	72,47	72,84
Kota Batu	69,76	70,62	71,55	71,89
Kota Probolinggo	68,14	68,93	70,05	70,49
Magetan	68,52	69,56	69,86	70,29
Mojokerto	68,71	69,17	69,84	70,22
Nganjuk	66,58	68,07	68,98	69,59
Tulungagung	67,76	68,29	69,3	69,49
Lamongan	66,21	67,51	68,9	69,42
Jombang	66,84	67,82	68,63	69,07
Madiun	65,98	67,32	68,07	68,6
Kediri	66,84	67,29	68,01	68,44
Ngawi	65,84	66,72	67,25	67,78

Lanjutan Tabel 1.1: Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2014

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Ponorogo	65,28	66,16	67,03	67,4
Banyuwangi	65,48	66,12	66,74	67,31
Blitar	65,47	66,17	66,49	66,88
Trenggalek	64,27	65,01	65,76	66,16
Malang	63,97	64,71	65,2	65,59
Bojonegoro	63,22	64,2	64,85	65,27
Tuban	62,47	63,36	64,14	64,58
Pasuruan	61,43	62,31	63,74	64,35
Situbondo	60,82	62,23	63,43	63,91
Pacitan	62,03	62,94	63,38	63,81
Bondowoso	60,46	62,24	63,21	63,43
Probolinggo	60,3	61,33	62,61	63,04
Pamekasan	60,42	61,21	62,27	62,66
Jember	60,64	61,31	62,43	62,64
Lumajang	60,72	61,31	61,87	62,33
Sumenep	58,7	60,08	60,84	61,43
Bangkalan	58,63	59,65	60,19	60,71
Sampang	55,17	55,78	56,45	56,98
<b>Jawa Timur</b>	<b>66,06</b>	<b>66,74</b>	<b>67,55</b>	<b>68,14</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2011-2014

Tabel 1.1, dapat dianalisis bahwa Kota Surabaya dan Kota Malang menjadi wilayah yang memiliki tingkat IPM paling tinggi diantara wilayah lainnya. Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan persentase IPM tiap tahunnya. Wilayah Tapal Kuda dan pulau Madura dilihat dari tingkat IPM tersebut, sebagian besar bahkan hampir seluruh kabupatennya berada pada tingkatan paling rendah. Wilayah Tapal Kuda tersebut meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso Dan Kabupaten Banyuwangi, dimana Wilayah ini seringkali dianggap sebagai daerah yang tertinggal di Jawa Timur. Dan untuk Pulau Madura meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Maka dari itu, menurut teori *Human Capital* perlu adanya intervensi dari pemerintah dengan pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk peningkatan

pembangunan di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura melalui indikator-indikator yang menjadi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul untuk penulisan tugas akhir ini adalah “**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI WILAYAH TAPAL KUDA DAN PULAU MADURA PROVINSI JAWA TIMUR tahun 2011-2014**”, dengan alasan agar dapat mengetahui seberapa besar tingkat pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) akan berdampak pada proses pembangunan, karena sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor pendorong di dalam pelaksanaan pembangunan. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait yaitu pemerintah dan peneliti :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam keadaan ekonomi masyarakat sesungguhnya.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi pemikiran terhadap pengambil keputusan kebijakan dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Peranan Modal Dalam Pertumbuhan Ekonomi

##### A. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith merupakan ekonom pertama kali yang membahas tentang masalah pertumbuhan ekonomi, ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Adam Smith menganggap bahwa pekerja merupakan salah satu input bagi proses produksi, dimana Adam Smith membahas upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Menurut Adam Smith, peningkatan keterampilan pekerja menjadi salah satu faktor pendorong dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Adam Smith juga menyatakan bahwa modal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, sehingga akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi (Sun'an, 2015:2-3).

Produktivitas yang tinggi dapat menghasilkan peningkatan kinerja, dengan kinerja yang meningkat maka akan meningkatkan pula minat untuk pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, dan lain-lain. Terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok menurut Smith dalam pertumbuhan output total yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok barang modal. Penduduk merupakan tenaga kerja, dimana laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan akumulasi modal dan laju pertumbuhan *output* (Sun'an, 2015:3).

##### B. Teori Pertumbuhan Endogen

Terdapat pemahaman baru tentang tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara, yaitu teori dari Lucas dan Romer "teori pertumbuhan endogen", dimana dalam teori ini disebutkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan tidak cukup apabila hanya dilihat dari besarnya PDRB tanpa ada upaya peningkatan pembangunan manusianya (Priambodo, 1995:9). Priambodo (1995:3) menyatakan bahwa teori pertumbuhan endogen lahir dari anggapan

ketidakmampuan teori neo-klasik Solow menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan output didorong oleh tingkat perkembangan teknologi, tetapi dalam model Solow tidak dijelaskan penyebab perkembangan teknologi. Sehingga lahirlah teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Paul M Romer dan Robert Lucas, teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dapat diciptakan oleh proses belajar (*learning by doing*), investasi dalam penelitian dan akumulasi dari pengetahuan. Pemahaman ini sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dalam proses produksi, sedangkan teori Neo-Klasik Solow tidak dapat menjelaskan dengan baik tentang perkembangan teknologi tersebut.

Dalam teori endogen terdapat dua cabang pemikiran, dimana kedua pemikiran tersebut sependapat bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang paling utama dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua cabang pemikiran tersebut, yaitu (a) yang pertama yaitu pemikiran bahwa *learning-by-doing* dengan memperkenalkan hal-hal baru untuk mencapai peningkatan produktivitas perekonomian, (b) yang kedua terdapat pemikiran bahwa *knowledge stock* dalam bentuk penemuan-penemuan baru merupakan kunci utama dari peningkatan produktivitas ekonomi.

Prijambodo (1995:9) menjelaskan bahwa peranan sumber daya manusia (SDM) dalam teori ini sangat diperhitungkan, karena sumber pertumbuhan dalam teori pertumbuhan endogen baik model *learning-by-doing* maupun penemuan baru, terkandung dalam kualitas SDM. Adam Smith juga telah menjelaskan pentingnya peranan SDM dalam pertumbuhan sejak akhir abad 18. Pengembangan teori ini memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan manusia, apabila pengetahuan baru dan ketrampilan terkandung dalam SDM, dan pembangunan ekonomi tergantung pada kemajuan teknologi, pengetahuan dan cara-cara baru dalam produksi, maka keberhasilan pembangunan akan ditentukan akumulasi dari kualitas SDM.

### 2.1.2 Modal Manusia (*Human Capital*) dalam Pembangunan

Almarhum Profesor Frederick Harbison dari Princeton University menyatakan bahwa “sumber daya manusia...merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif; manusialah yang merupakan agen-agen aktif yang akan membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan pembangunan nasional. Jelaslah, bahwa jika suatu negara tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional, maka untuk selanjutnya negara tersebut tidak akan dapat mengembangkan apa pun” (Todaro, 2000:384).

Krisis ekonomi memberikan pelajaran bahwa negara-negara yang memiliki kualitas SDM yang baik akan lebih cepat untuk pulih dari krisis yang melanda. Pendidikan dan kesehatan merupakan dasar dari tujuan suatu pembangunan, kesehatan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan, sedangkan peran penting pendidikan dalam suatu negara berkembang yaitu menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Todaro menyatakan, “Modal manusia adalah investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi--sering kali dihasilkan dari pengeluaran di bidang pendidikan program pelatihan dalam pekerjaan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai dalam pemilihan lokasi” (Todaro, 2011:445-447). Istilah modal manusia sering digunakan para ekonom untuk mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas (Todaro, 2011:452).

Dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan pendapatan saja tidaklah cukup. Terdapat hubungan kausalitas yang berlangsung dua arah, yaitu pendapatan yang lebih tinggi akan membuat warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan, dan dengan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik menghasilkan produktivitas yang tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Dengan adanya

hubungan kausalitas tersebut maka terciptalah suatu paket kebijakan terpadu, yaitu pembangunan yang difokuskan pada pendapatan, kesehatan, dan pendidikan secara bersamaan (Todaro, 2011:449). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan dasar modal manusia berfokus pada kemampuan tak langsung dari kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan (Todaro, 2011:452).

### 2.1.3 Konsep Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia menurut BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki ide pokok yang mendasar yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Pembangunan manusia ini memiliki tujuan, salah satu tujuannya secara umum yaitu memberikan pilihan kepada masyarakat untuk hidup penuh kebebasan dan bermartabat dengan menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (BPS, 2016:7).

Sun'an dan Senuk (2015:107) menyatakan bahwa konsep pembangunan manusia (*people centered development*) bukan hal yang baru dalam wacana konsep maupun praktik pembangunan. Konsep ini terlahir dari adanya kegagalan model pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, dimana model pembangunan pertumbuhan ekonomi tidak mampu untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata. Dan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pendidikan menjadi faktor yang sangat strategis. Dilansir dari "*World commission on enviromental and development*", 1997 dimana *sustainable development* adalah: "*..... is development that meets the needs of the present without comprimising the ability of future generations to meet their own needs*". Dari pernyataan tersebut, pendidikan menjadi sebuah alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, dimana diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

Secara konvensional, pembangunan SDM (sumber daya manusia) diartikan sebagai investasi *human capital* yang harus dilakukan sejalan dengan investasi *physical capital*. Dimana pembangunan manusia ditempuh melalui upaya pendidikan dan pelatihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas dan

pengembangan *entrepreneurial*. Karenanya indikator kinerja pembangunan SDM mencakup indikator-indikator pendidikan, kesehatan, dll (Sun'an dan Senuk, 2015:105). Sedangkan Payaman Simanjuntak (2005) mendefinisikan investasi SDM (human investment) dapat berupa pelatihan, dimana untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai.

Banyak pakar ekonomi yang berpendapat bahwa SDM (sumber daya manusia) yang lebih menentukan kecepatan dan keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial dibandingkan dengan modal fisik atau sumber daya fisik. SDA dan modal fisik ini merupakan faktor produksi yang bersifat pasif, sedangkan SDM merupakan faktor produksi yang bersifat aktif, dimana SDM melakukan penghimpunan modal, mengeksploitasi SDA, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional (Kamaluddin, 1999:60).

Pembangunan manusia dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas manusia, karena SDM (Sumberdaya Manusia) merupakan suatu unsur yang potensial dalam kelancaran pembangunan nasional (Daryanto, 1996:21). Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*) pembangunan manusia adalah "*a process of enlarging people's choices*" yang artinya adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia, dengan kata lain, pembangunan manusia merupakan upaya untuk memberikan banyak pilihan dan kebebasan untuk memilih bagi penduduk, penjelasan ini memiliki arti dimensi pembangunan yang luas. Dasar pemikiran konsep pembangunan manusia menurut UNDP (1995:103) meliputi aspek-aspek berikut:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata;

- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal;
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan;
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Penduduk merupakan tujuan akhir dari konsep tersebut, sedangkan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir yaitu upaya pembangunan. Terdapat empat hal pokok dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan manusia, antara lain:

- a. Produktifitas, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam proses peningkatan produktivitas untuk mencapai penciptaan pendapatan.
- b. Pemerataan, setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
- c. Kesinambungan, memastikan sumber daya fisik, manusia dan lingkungan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang, tetapi harus selalu diperbaharui.
- d. Pemberdayaan, penduduk diharuskan untuk selalu berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan untuk menentukan kehidupan mereka.

#### **2.1.4 Konsep Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki atau dengan kata lain IPM merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Baik dari sisi kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan secara fisik dapat dilihat dari angka harapan hidup dan kemampuan daya beli,

sedangkan untuk pembangunan non-fisik dapat dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. Status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok yaitu (BPS, 2016:23):

- Sangat Tinggi :  $IPM \geq 80$
- Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
- Sedang :  $60 \leq IPM < 70$
- Rendah :  $IPM < 60$

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, 3 (tiga) indeks tersebut antara lain (BPS, 2008:9-12):

#### 1. Indeks Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan atas rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan AHH ini menggunakan data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), perhitungan ini menggunakan metode pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

#### 2. Indeks Pendidikan

Komponen pembentuk IPM yang kedua yaitu tingkat pendidikan, dimana data yang digunakan yaitu data Rata-Rata Lama Sekolah (*mean years of schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dalam pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga sedangkan harapan lama sekolah memiliki bobot dua pertiga, lalu penggabungan dua indikator ini menjadi indeks pendidikan. Rata-rata lama sekolah yaitu jumlah lamanya penduduk usia 15 tahun ke atas menjalani pendidikan formal.

### 3. Indeks Standart Hidup Layak

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh penduduk sebagai dampak dari dari semakin membaiknya kondisi perekonomian. UNDP dalam mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Indeks ini dapat dikatakan sebagai kemampuan daya beli masyarakat, untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

Terdapat tiga tahapan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu tahapan pertama perhitungan indeks setiap komponen IPM. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut (BPS, 2017):

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

Keterangan:

$X(i)$  = Komponen IPM ke-i

$X(\min)$  = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i

$X(\max)$  = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i.

Tahapan kedua yaitu menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks  $X(i)$  dengan rumus:

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{X_1 \times X_2 \times X_3} \times 100$$

Keterangan :

$X_1$  = Indeks Harapan Hidup

$X_2$  = Indeks Pendidikan

$X_3$  = Indeks Standart Hidup Layak

Tahapan terakhir yaitu menghitung reduksi shortfall, dimana untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi shortfall per tahun. Reduksi shortfall menunjukkan perbandingan antara

capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100). Semakin tinggi nilai reduksi shortfall, semakin cepat peningkatan IPM.

$$r = \{ (IPM_{t+n} - IPM_t) / (IPM_{ideal} - IPM_t) \times 100 \}^{1/n}$$

Keterangan:

IPM<sub>t</sub> = IPM pada tahun t

IPM<sub>t+n</sub> = IPM pada tahun t+n

IPM ideal = 100

### 2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Sentra pembangunan manusia terletak pada perkembangan modal manusianya, teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith menjelaskan bahwa modal dalam pertumbuhan ekonomi meliputi modal fisik, modal manusia dan modal alam, pencapaian pertumbuhan dan kemajuan ekonomi sangat bergantung pada pembentukan modal dalam arti luas (modal fisik, modal manusia dan modal alam). Pembangunan yang berkelanjutan terjadi ketika modal dapat meningkat dalam jangka panjang, yaitu ketika modal fisik dan modal manusia mengalami peningkatan tetapi tetap dapat menjaga kelestarian modal alam.

World Bank (2001) dalam Abbas (2010) mengatakan bahwa kemajuan dalam modal manusia dapat meningkatkan produktivitas dan tingkat pengembalian modal fisik. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap angka produksi (Todaro, 2003:92-98). Proses tersebut tidak terlepas dari kebijakan institusi dan pemerintah, komitmen pemerintah dalam pendistribusian sumber daya dilakukan melalui dua saluran, yakni dari kebijakan pengeluaran pemerintah pada prioritas sosial seperti pembangunan infrastruktur dan melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan individu rumah tangga (sandang, pangan dan papan), kedua hal tersebut selanjutnya dapat membangun manusia yang berkualitas (Patriotika, 2011:19).

Teori pertumbuhan endogen yang dicetuskan oleh Lucas dan Romer menekankan pada pentingnya tabungan dan investasi terhadap modal manusia, model pertumbuhan ini menjelaskan bahwa kebijakan publik berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam modal manusia dan mendorong investasi asing dalam perkembangan teknologi.

Todaro menyatakan, “Modal manusia adalah investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi” (Todaro, 2011:445-447). Menurut Schweke (2004) dalam *Patriotika* (2011:21), pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga investasi dibidang pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dalam pembangunan manusia. Kesehatan menjadi salah satu faktor terpenting pembangunan manusia, tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi (*Patriotika*, 2011:22). Lokasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, hal ini dikarenakan dengan adanya infrastruktur yang memadai pada suatu wilayah dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan meningkatnya lapangan pekerjaan maka akan meningkatkan pula pendapatan masyarakat, dengan pendapatan yang meningkat maka daya beli masyarakat akan meningkat pula.

#### **2.1.6 Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi**

Reksohadiprojo (2001:1) menjelaskan tentang ekonomi publik, dimana ekonomi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang peranan pemerintah dalam perekonomian yang salah satunya berupa kebijakan fiskal. Ekonomi publik membicarakan bagaimana peran negara atau pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat yang bersifat umum, menurut Adam Smith, pemerintah hanya memiliki tiga fungsi dalam suatu negara, yaitu yang

pertama fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, kedua yaitu fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan, dan yang ketiga fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan dan sebagainya (Mangkoesobroto, 1999).

Sektor swasta tidak dapat sepenuhnya menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat karena pihak swasta hanya akan menyediakan kebutuhan masyarakat yang akan memberikan keuntungan besar bagi pihak swasta, sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang publik, barang publik tersebut meliputi pembangunan jembatan, jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Barang publik yang disediakan oleh pemerintah memiliki harga yang relatif lebih murah dari pada barang swasta.

Ekonomi publik menelaah tentang keuangan dari sektor pemerintah, antara lain membahas tentang pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah, hutang dan pinjaman pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter, dan lain-lain. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari permintaan agregat, konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa  $Y = C + I + G + X - M$ ,  $Y$  adalah pendapatan nasional (dalam arti luas) dan menggambarkan penawaran agregat. Sedangkan untuk ruas kanan merupakan variabel-variabel permintaan agregat, dimana  $G$  adalah variabel pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Dengan membandingkan nilai  $G$  terhadap  $Y$  lalu mengamatinya dari waktu ke waktu, maka dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional. Pemerintah tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memiliki penerimaan, dan keduanya diringkas ke dalam konsep terpadu yaitu pendapatan dan belanja negara atau daerah, dan kebijaksanaan yang berkenaan dengan konsep tersebut disebut dengan kebijaksanaan fiskal (Dumairy, 1996:157).

Kaum fiskalis (Keynes) menginginkan peran aktif pemerintah sehingga dipergunakanlah kenaikan pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai perangkat kebijakan, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian menuju keadaan yang diinginkan

dengan cara merubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Hasyim, 2016:5). Pengeluaran pemerintah Indonesia dapat dilihat dari total pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Agak sulit membedakan dengan tegas apakah suatu pengeluaran termasuk ke dalam pengeluaran rutin ataukah sebagai pengeluaran pembangunan, karena batas perbedaan antara keduanya relatif kabur (Dumairy, 1996:164-165).

Semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah untuk suatu hal yang produktif maka akan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara atau daerah tersebut. Jika dilihat dari beberapa penelitian jumlah pengeluaran pemerintah sebagian besar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi tidak menutup kemungkinan pengeluaran pemerintah mengalami penurunan (Cahyono, 2012:1). Klasifikasi pengeluaran pemerintah menurut Suparmoko (1996), pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, antara lain: (1) pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang, (2) pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, (3) pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang, dan (4) pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Menurut Meier dan Rauch dalam Winarti (2014:54) suatu bangsa harus memiliki tingkat investasi yang tinggi dalam bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai standar ekonomi dan kehidupan bangsa yang lebih baik. Sumarsono (2003:58) berpendapat bahwa besarnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan dan kesehatan menjadi ukuran yang menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas SDM. Pemerintah Indonesia telah menganggarkan minimal 20% dana APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan, sehingga dapat dilihat bahwa pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai sektor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan (World Bank, 2007:2), sedangkan untuk bidang kesehatan dalam ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemerintah

mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara diluar gaji sedangkan untuk daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diluar gaji. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Indonesia memiliki persentase terkecil. Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa kebijakan sosial di bidang kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya didukung komitmen pemerintah, padahal pembangunan di bidang kesehatan merupakan satu pilar pengentasan kemiskinan dan faktor penentu indeks pembangunan manusia (IPM) (Kurnianingsih, hal. 15-16).

Meier dan Rauch dalam Sanggelorang *et al* (2015:2) menjelaskan bahwa kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak, sehingga kedua investasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggapai tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang lebih baik, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, tidak hanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan saja yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dimana infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung proses pertumbuhan ekonomi, infrastruktur juga sebagai gambaran pemerataan pembangunan yang terjadi (Larassita, 2016:23).

#### **2.1.7 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dalam Pembangunan Manusia.**

Jika suatu negara tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya maka tidak akan dapat memanfaatkan potensi mereka dalam pembangunan, hal ini merupakan konsep *Human Capital* dari Profesor Frederick Harbison (Todaro, 2000:384). Banyak negara berkembang yang menganggap bahwa pendidikan formal merupakan sebuah industri yang konsumennya merupakan konsumen terbesar dari anggaran pemerintah. Terdapat anggapan bahwa, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang penduduk maka akan semakin baik pula kesempatan penduduk tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan pendapatan tinggi dan jaminan hidup yang lebih baik. Dan akibat dari munculnya anggapan tersebut, tingkat pengeluaran pemerintah di

negara-negara berkembang untuk bidang pendidikan melonjak sangat tajam (Todaro, 2000:388).

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mutlak diperlukan, mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam upaya peningkatan kualitas penduduk. Dengan kondisi pendidikan penduduk yang baik dapat digambarkan dengan tingkat produktivitas penduduk yang tinggi, hal ini merupakan upaya dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan ini merupakan salah satu dari wujud *government expenditure*, dimana *government expenditure* merupakan kebijakan fiskal yang sebagian diarahkan untuk memberikan dana kepada masyarakat khususnya dalam bentuk dana pembangunan.

Menurut Sumarsono (2003:58) pendidikan berperan tingkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), dalam menghadapi persaingan bebas, masyarakat membutuhkan dukungan semua pihak untuk menjadi SDM yang berkualitas sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang memiliki daya saing. Agar tidak tertinggal dengan masyarakat internasional maka peningkatan pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar masyarakat.

#### **2.1.8 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Dalam Pembangunan Manusia**

Kesehatan merupakan kunci utama dari kesejahteraan hidup, tanpa kesehatan warga negara tidak bisa melakukan proses produksi, yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan perlindungan dan fasilitas kesehatan, hal ini disebutkan dalam UUD 1945 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM), dan dalam tujuan pembangunan telah disebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan (Astri *et al*, 2013:9).

Astri *et al* (2013:9) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan bentuk usaha pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan harus dipandang sebagai investasi dalam peningkatan sumber daya manusia, mengingat kesehatan

merupakan faktor dominan kedua dalam upaya peningkatan kualitas penduduk. Menurut Lains dan Pasay dalam Astri *et al* (2013:9) menyatakan bahwa kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dan mental yang terbelakang.

### **2.1.9 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Dalam Pembangunan Manusia**

Menurut konsep *Human Capital* pemilihan lokasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas SDM, jadi dengan adanya pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dapat menjadi investasi yang produktif terhadap lokasi di sekitar masyarakat (Todaro, 2011:445-447). Fatimah dalam Larassita (2016:25) menjelaskan bahwa dengan adanya pertumbuhan penduduk maka akan berdampak pada penyediaan fasilitas umum yang memadai dan perumahan yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk. Jika infrastruktur gagal dipenuhi oleh pemerintah maka akan berdampak kepada kehidupan masyarakat dengan kondisi rendahnya kualitas/daya saing penduduk, keadaan ini dapat digambarkan dengan rendahnya tingkat produktivitas penduduk.

Di hampir seluruh negara berkembang, standar hidup sebagian penduduknya berada pada level yang rendah, sebutan rendah ini dapat dibandingkan dengan standar hidup kaum elit di negara itu sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut dapat digambarkan dengan jumlah pendapatan uang yang sangat sedikit, perumahan yang kurang layak, peluang mendapat pekerjaan sangat rendah, dsb (Todaro, 2000:52). Banyaknya penduduk dengan standar hidup yang rendah merupakan fenomena kemiskinan, dimana konsep kemiskinan absolut dari ahli ekonomi diciptakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik minimum setiap orang berupa kecukupan atas kebutuhan primer, sekunder dan tersier (Todaro, 2000:59). Kebutuhan fisik seperti perumahan merupakan faktor pendorong kesejahteraan penduduk, dimana dapat kita ketahui bahwa pada saat ini pemerintah sedang menjalankan program KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bersubsidi pemerintah. Hal ini merupakan salah satu contoh pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendorong tingkat kesejahteraan penduduknya.

Kali (2016:19) menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur merupakan *social overhead capital* yaitu barang-barang modal yang menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha menghasilkan dan meningkatkan produksi, misalnya sarana perumahan, penyediaan transportasi, pelabuhan, bandara dan fasilitas umum lainnya. Dan infrastruktur tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat perkembangan suatu wilayah, dimana digambarkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika suatu wilayah memiliki infrastruktur yang lengkap maka dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya dan berbeda pula dengan wilayah yang memiliki infrastruktur yang minim, maka pendukung kesejahteraan masyarakat sangatlah terbatas.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berhubungan dan hampir mirip dengan penelitian ini, yang kemudian dipergunakan sebagai referensi oleh peneliti. Penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut antara lain:

Yang pertama, penelitian tentang pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi lampung dilakukan oleh Dwi Adi Putra (2014). Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel Pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung. Saran dari peneliti yang diberikan dalam adalah diperlukan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan alokasi pengeluaran pemerintah khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia.

Yang kedua yaitu penelitian dari Mochammad Yuli Arifin (2015), dimana Arifin meneliti tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur. Arifin menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara,

dimana pembangunan suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur.

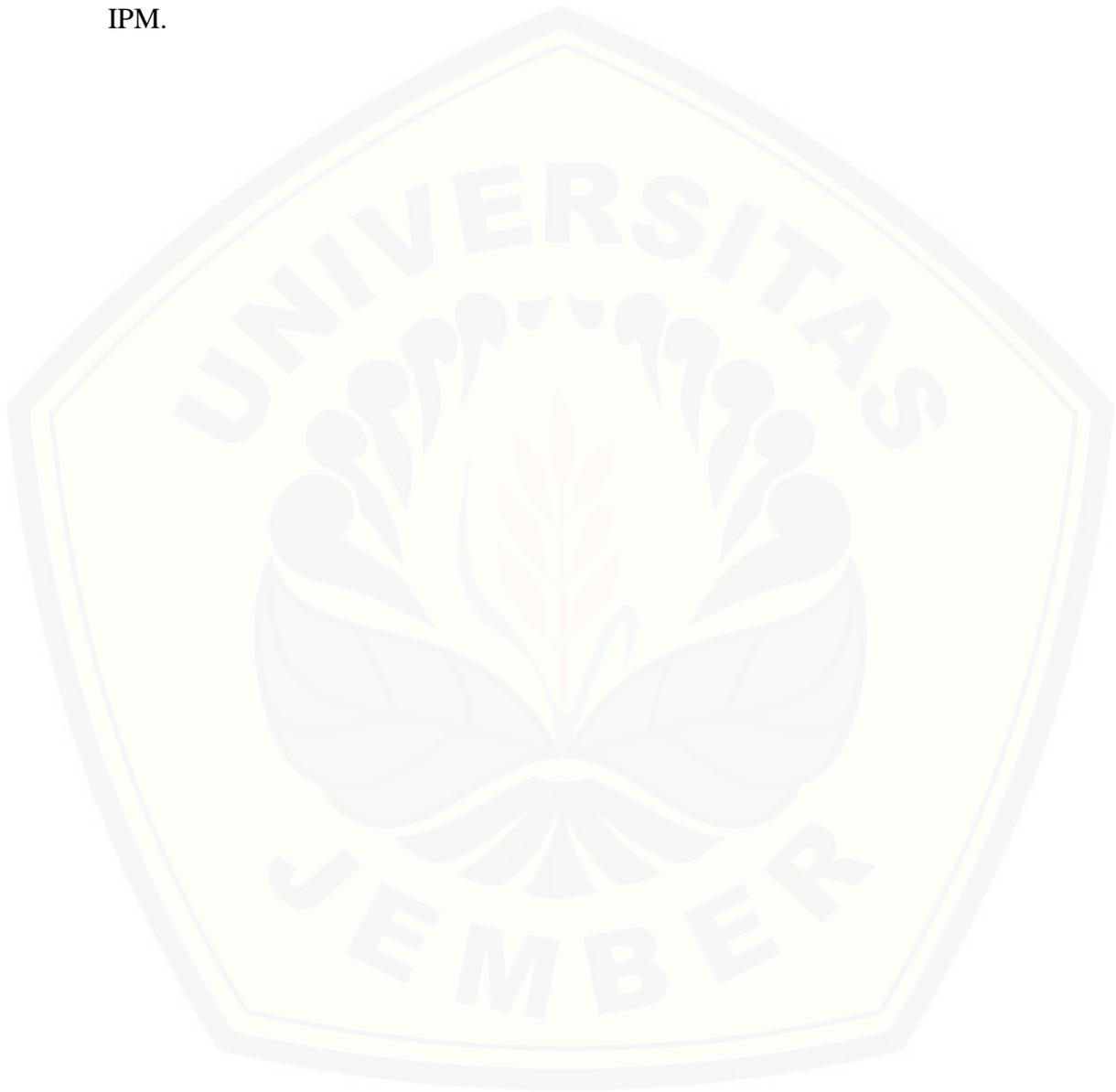
Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, Dan Hanly F.DJ. Siwu (2015). Mereka membahas tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi utara. Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Yufika Furi Larassita (2016), dimana ia membahas tentang pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur. Dalam penelitiannya Yufika menjelaskan bahwa realisasi anggaran pemerintah cenderung meningkat setiap tahunnya bertujuan untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Jember.

Selanjutnya yaitu penelitian dari M. Alyuriza Syalkahfi (2016), ia membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia provinsi Lampung. Dan hasil dari penelitiannya, semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Lampung.

Yang terakhir yaitu penelitian dari Vicky Kresno Kuncoro (2016), ia meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Karesidenan Besuki, dengan variabel independennya yaitu

pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Hasil dari penelitiannya yaitu variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM.



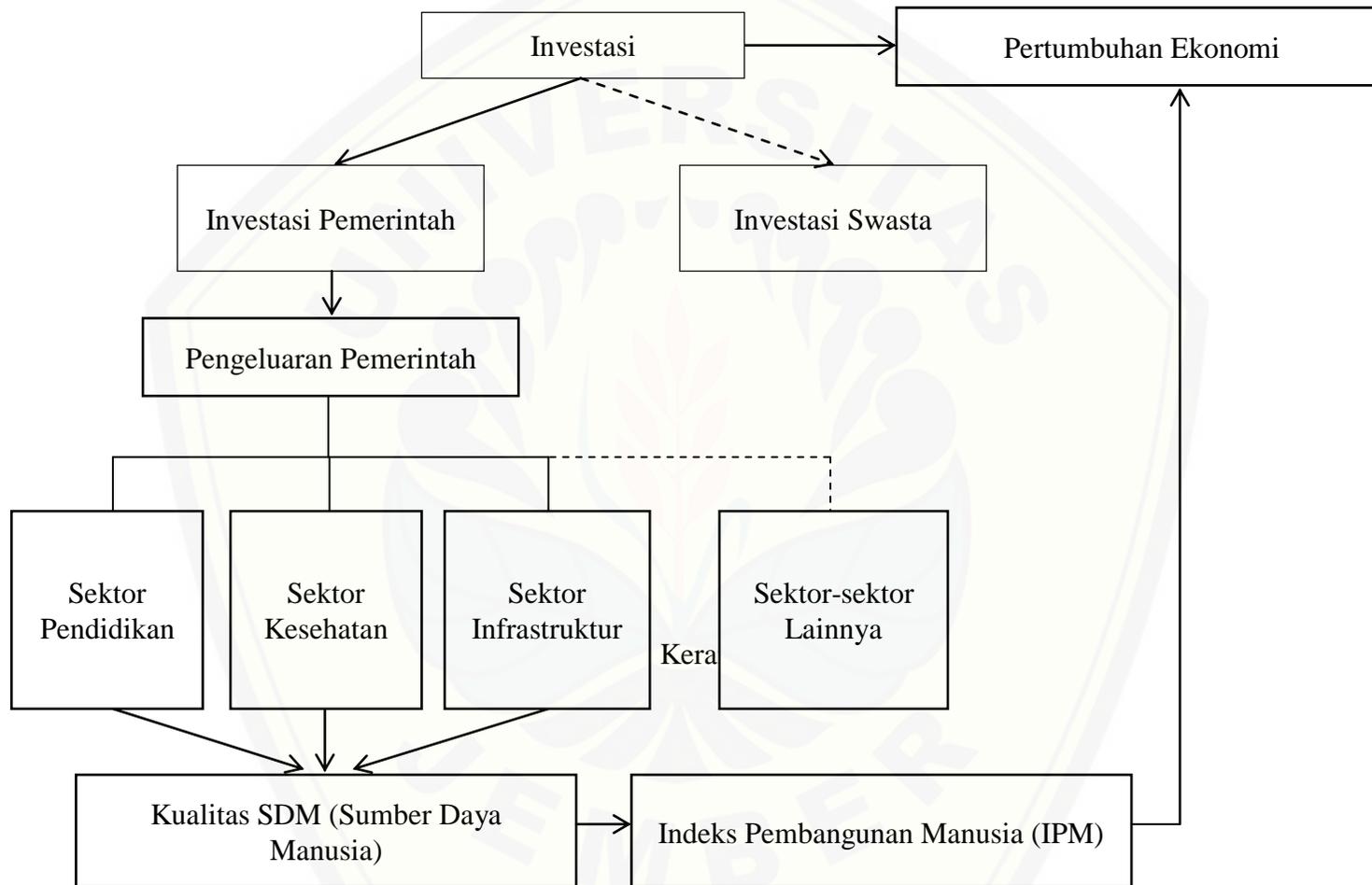
Tabel 2.1: Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Judul Dan Tahun Penelitian	Variabel dan Alat Analisis Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Dwi Adi Putra, “analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi lampung tahun 1995-2012”, 2014.	Pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, IPM. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda dengan metode <i>Ordinary Least Square (OLS)</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel Pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Lampung.
2.	Mochammad Yuli Arifin. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013”, 2015.	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Analisis data panel menggunakan pendekatan <i>fixed effect</i> .	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013 sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013.
3.	Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rimate, Dan Hanly F.DJ. Siwu. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara”, 2015.	Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia, Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS versi 21.	Variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar -0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap

<p>4. Yufika Furi Larassita, “pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten jember periode 1990-2014”, 2016</p>	<p>Anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, indeks pembangunan manusia, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan data <i>time series</i>.</p>	<p>indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur.</p>
<p>5. M. Alyuriza Syalkahfi, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 1999-2014”, 2016.</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, dengan teknik analisis OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)</p>	<p>Variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.</p>
<p>6. Vicky Kresno Kuncoro, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Eks Karesidenan Besuki”, 2016.</p>	<p>Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Penelitian Ini Menggunakan Analisis Data Panel</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM.</p>

### 2.3 Kerangka Konseptual

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi, teori klasik adam smith menyatakan bahwa modal memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan akumulasi modal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal salah satunya dapat terbentuk melalui adanya investasi, investasi dibedakan menjadi investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah dalam penelitian ini berupa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Menurut teori dari Todaro tentang modal manusia, ia menyatakan bahwa modal manusia merupakan investasi produktif terhadap pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan lokasi, sesuai dengan dasar teori tersebut maka pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan lokasi dapat mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diukur dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia dapat meningkatkan kemampuan pekerja sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas dengan teknologi serta dapat menciptakan pengembangan produk.



## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur;
2. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur;
3. Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

#### 3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode *explanatory*, dimana penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat (Nasir, 1998:45). Dimana menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel-variabel terikat serta pengaruhnya antar masing-masing variabel melalui pengujian hipotesa (Sugiono, 2012:11).

#### 3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur sebagai variabel dependen, dan menggunakan variabel independen meliputi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur.

#### 3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pengelolaan Keuangan Pusat Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah disusun dan dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah penggabungan dari data *time series* tahun 2011 sampai 2014 dan data *cross section* dari 11 Kabupaten di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Data sekunder tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2014.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2014.
3. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2014.

4. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2014.

## 3.2 Metode Analisis

### 3.2.1 Analisis Regresi Data Panel

Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur digunakan regresi data panel. Data panel (*pooled data*) adalah sebuah kumpulan data yang berisi data sampel individu (perusahaan, kabupaten/kota, dll) pada periode waktu tertentu, dengan kata lain data panel merupakan gabungan antara lintas-waktu (*time series*) dan lintas-individu (*cross-section*) (Ekananda, 2016:1). Dalam teori ekonometri, proses penyatuan kedua data yaitu *time series* dan *cross section* disebut dengan pooling, sedangkan yang dihasilkan disebut dengan *pooled data* atau panel data atau *longitudinal data* (Ekananda, 2015:369). Kelebihan atau keuntungan secara statistik maupun secara teori ekonomi yang diberikan data panel, yaitu:

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik-individu digunakan dalam persamaan ekonometrika.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas setiap individu, pada gilirannya membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas, maka penggunaan data panel akan mengurangi masalah *omitted-variables* secara substansial.
4. Karena mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang, maka data panel sangat baik digunakan *untuk studi of dynamic adjustment*.
5. Dengan meningkatnya jumlah observasi, maka akan berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel akan semakin

berkurang dan peningkatan *degree of freedom* sehingga akan diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

6. Pengembangan lebih lanjut analisis data panel ditunjukkan pada model sebelumnya ditunjukkan pada data waktu untuk satu individu untuk menjadi analisis beberapa individu.

Adapun fungsi model ekonomi dari variabel-variabel tersebut, sebagai berikut:

$$IPM = f(PDD, KES, INF)$$

Selanjutnya mentransformasikan fungsi tersebut ke dalam model ekonometrika, sebagai berikut:

$$IPM = \alpha + \beta_1 PDD_{i,t} + \beta_2 KES_{i,t} + \beta_3 INF_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
PDD	= Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan
KES	= Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan
INF	= Pengeluaran Pemerintah di Sektor Infrastruktur
$\alpha$	= Intercept
$\beta_{it}$	= Koefisien Variabel
$\epsilon$	= <i>Error Term</i>
i	= 1,2,..., N (banyaknya sampel/observasi)
t	= 1,2,..., T (banyaknya waktu)

Dalam mengestimasi model regresi data panel dapat menggunakan beberapa metode, antara lain:

1. Metode *Common Effect* atau *Pooled Least Square* (PLS)

Estimasi dalam metode ini merupakan metode estimasi yang paling sederhana yang mengkombinasikan antara data *Time Series* dan *Cross Section* dengan asumsi intercept dan koefisien slope yang konstan (tidak ada dimensi deret antar waktu). Dengan kata lain, regresi data panel yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap variabel individu. Dalam PLS estimator akan menghasilkan *intercept*  $\alpha$  dan *slope*  $\beta$  sama untuk setiap individu ( $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_i$  dan  $\beta_{k1} =$

$\beta_{k2} = \beta_{k3} = \dots = \beta_{ki}$ ), dimana  $k$  merupakan jenis variabel dan  $i$  adalah observasi ke- $i$ .  
Persamaan yang digunakan, sebagai berikut:

$$IPM_{i,t} = \alpha + \beta_1 PDD_{i,t} + \beta_2 KES_{i,t} + \beta_3 INF_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Struktur model ini mengasumsikan tidak adanya perbedaan karakteristik IPM di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur selama waktu observasi.

## 2. Metode *Fix Effect Model* (FEM)

Metode *Fixed Effect* merupakan suatu metode yang menjelaskan bahwa intersep pada regresi dapat dibedakan antara individu dan dianggap memiliki karakteristik yang berbeda yang biasanya menggunakan variabel *dummy*.  
Persamaan yang digunakan, sebagai berikut:

$$IPM_{i,t} = \alpha + \beta_1 PDD_{i,t} + \beta_2 KES_{i,t} + \beta_3 INF_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Struktur model ini mengasumsikan adanya perbedaan karakteristik IPM di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura selama waktu observasi. Penggunaan kata *fixed* untuk menunjukkan bahwa faktor penyebab heterogenitas disetiap individu diasumsikan tetap sepanjang waktu observasi. Pengaruh yang tetap dilihat dari penggunaan nilai yang sama (nilai 1) sepanjang waktu. Nilai 1 ditempatkan pada individu tertentu dan nol untuk individu lainnya. Konsep ini lah yang biasa disebut dengan variabel *dummy*. Secara umum struktur model dalam bentuk *Least Square Dummy Variabel* (LSDV), sebagai berikut:

$$IPM_{i,t} = \alpha_i + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \beta_1 PDD_{1i} + \beta_2 KES_{2i} + \beta_3 INF_{3i} + \epsilon_{i,t}$$

## 3. Metode *Random Effect Model* (REM)

Selanjutnya metode *Random Effect* yang menjadi pelengkap dari metode *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*. Adanya variabel *dummy* dalam *fixed effect* memberikan konsekuensi kurangnya *degree of freedom* sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. Penentuan  $\alpha$  dan  $\beta$  didasarkan pada asumsi bahwa *intercept*  $\alpha$  terdistribusi *random* antar unit  $\mu_i$ . Dengan kata lain, *slope* memiliki nilai yang tetap tetapi *intercept* bervariasi untuk setiap individu. Sehingga persamaan dalam model ini, sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha_{1i} + \beta_{PDD} PDD_{it} + \beta_{KS} KES_{it} + \beta_{INF} INF_{it} + \mu_{it}$$

Dapat dilihat bahwa *slope*  $\beta$  memiliki nilai tetap, tetapi  $\alpha_{1i}$  memiliki nilai yang bervariasi karena pengaruh *random*  $\epsilon_i$  terhadap *intercept*  $\alpha_i$  ( $\alpha_{1i} = \alpha_i + \epsilon_i$ ) yang bernilai tetap.

### 3.2.2 Uji Penentuan Model

Dasar pemilihan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* menurut Gujarati (2006) adalah sebagai berikut:

1. Jika T (jumlah data time series) besar dan N (jumlah data dari cross section) kecil, maka akan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai parameter yang diestimasi oleh *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan kemudahan penghitungan sehingga *Fixed Effect Model* lebih baik.
2. Ketika N besar dan T kecil, estimasi yang diperoleh dari kedua metode akan memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak maka *Random Effect Model* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *Fixed Effect Model*.
3. Jika komponen error individual berkorelasi dengan variabel independen X maka parameter yang diperoleh dengan *Random Effect Model* akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan *Fixed Effect Model* tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *Random Effect Model* akan lebih efisien dari *Fixed Effect Model*.

Beberapa macam uji dalam penentuan model data panel, antara lain:

a. Uji Chow

Uji ini bertujuan untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square Model (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM). Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : *Pooled Least Square Model*

$H_1$ : *Fixed Effect Model*

$H_0$  ditolak jika *p-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sebaliknya  $H_0$  lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang digunakan sebesar 5% (0,05).

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : *Random Effect Model*

$H_1$ : *Fixed Effect Model*

$H_0$  ditolak jika *p-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sebaliknya  $H_0$  lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang digunakan sebesar 5% (0,05)

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji ini bertujuan untuk memilih antara *Random Effect Model* (REM) dan *Pooled Least Square Model* (PLS) digunakan *The Breusch-Pagan LM Test* dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : *Pooled Least Square Model*

$H_1$ : *Random Effect Model*

*The Breusch-Pagan LM Test* ini didasarkan pada distribusi Chi square dengan derajat bebas sebesar satu. Jika hasil *Breusch-Pagan LM* statistik lebih besar dari nilai  $X^2 (1)$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti *Random Effect Model* lebih baik daripada *Pooled Least Square Model*.

### 3.2.3 Uji Statistik

a. Uji F Statistik

Gujarati (1997; 120) menjelaskan dalam bukunya bahwa uji F ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM secara simultan, dengan persamaan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)(n-k)}$$

Keterangan:

- F : Pengujian secara simultan  
R<sup>2</sup> : Koefisien determinasi berganda  
k : Banyaknya variable  
n : Banyaknya observasi (sampel)  
k : Derajat bebas pembilang  
n-k : Derajat bebas penyebut

Perumusan Hipotesis:

H<sub>0</sub> :  $b_1, b_2, b_3 = 0$ , artinya bersama-sama variable bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat yaitu indeks pembangunan manusia (IPM);

H<sub>0</sub> :  $b_1, b_2, b_3 \neq 0$ , artinya bersama-sama variable bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat yaitu IPM.

Kriteria Pengujian:

- a. Jika probabilitas  $F_{hitung} \leq$  tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 5%, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima, yang berarti ada pengaruh antar variable bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur secara bersama-sama terhadap variable terikat yaitu IPM;
- b. Jika probabilitas  $F_{hitung} >$  tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 5%, maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antar variable bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur secara bersama-sama terhadap variable terikat yaitu IPM.

b. Uji t Statistik

Gujarati (1997; 120) dalam bukunya menjelaskan bahwa uji t digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial atau terpisah. Pengujian ini

dilakukan untuk melihat kuat tidaknya pengaruh masing-masing variable bebas secara terpisah terhadap variable terikat. Rumus t hitung sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{Sb_i}$$

Keterangan:

t : t hitung (pengujian secara parsial)

$b_i$  : koefisien regresi linier berganda

$Sb_i$  : standar error devisiasi

Perumusan Hipotesis:

1.  $H_0: b_1 = 0$ , artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variable bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap variable terikat IPM;
2.  $H_0: b_1 \neq 0$ , artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variable bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terhadap variable terikat IPM.

Kriteria Pengujian:

1. Jika probabilitas  $t_{hitung} \leq \alpha$  ( $\alpha = 5\%$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti ada pengaruh antara variable bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara parsial terhadap variable terikat yaitu IPM;
2. Jika probabilitas  $t_{hitung} > \alpha$  ( $\alpha = 5\%$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh secara nyata antara variable bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara parsial terhadap variable terikat yaitu IPM.

c. Koefisien Determinan Berganda ( $R^2$ )

Gujarati (1997; 139) menjelaskan untuk mengetahui kontribusi variable bebas terhadap perubahan variable terikat, maka akan ditinjau dari hasil uji koefisien determinasi atau uji  $R^2$ . Nilai  $R^2$  ini terletak diantara 0 sampai dengan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Penelitian ini menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + b_3 \sum x_3 y}{\sum y^2}$$

Keterangan:

$R^2$  : koefisien determinan

ESS : jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS : jumlah kuadrat yang residual

TSS : ESS + RSS

$R^2$  terletak antara 0 dan 1. Kecocokan model dikatakan lebih baik apabila nilai  $R^2$  semakin dekat dengan 1.

### 3.2.4 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel-variabel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak, dimana variabel-variabel tersebut yaitu variabel dependen dan variabel independen. Kriteria model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Ghozali (2005) dalam Larassita (2016:39) menyebutkan dan menjelaskan apa saja dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data, yaitu:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### b. Uji Multikolinearitas

Gujarati (1997; 169) menjelaskan bahwa uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Uji multikolinearitas merupakan cara untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak, dimana regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel bebas (wardhono, 2012; 56). Pengujian ini dilakukan secara parsial yakni melakukan regresi antara variabel bebas dengan menjadikan salah satu variabel tersebut sebagai variabel terikat (Gujarati, 1997: 438).

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika  $r^2$  hasil regresi variabel bebas  $>$   $R^2$  hasil regresi berganda berarti antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur terjadi multikolinearitas;
2. Jika  $r^2$  hasil regresi variabel bebas  $<$   $R^2$  hasil regresi berganda berarti antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur tidak terjadi multikolinearitas.

#### c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  dalam suatu model regresi linier. Dan juga uji autokorelasi digunakan untuk melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi dengan melihat besarnya nilai  $D-W$  (*Durbin-Watson*), dengan batasan sebagai berikut (Larassita, 2016:38):

1. Bila nilai  $D-W >$  batas atas ( $d_U$ ), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada autokorelasi positif;
2. Bila nilai  $D-W <$  batas bawah ( $d_L$ ), maka koefisien autokorelasi sama lebih besar nol, yang berarti ada autokorelasi positif;

3. Bila nilai D-W terletak di antara batas atas (dU) dan batas bawah (dL), maka tidak dapat disimpulkan.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Terdapat cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas, yaitu dengan melakukan uji *white heteroschedasticity*. Caranya dengan membandingkan nilai  $X^2$  dengan nilai  $X^2$  tabel dan nilai  $\text{Obs} \cdot R^2$  dengan  $\epsilon$ . Jika nilai  $X^2 <$  dari pada nilai  $X^2$  tabel dan nilai  $\text{Obs} \cdot R^2 > \epsilon$  (5%) sehingga model bisa dikatakan tidak terdiaknosa masalah heteroskedastisitas. Ghozali (2011; 97) menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

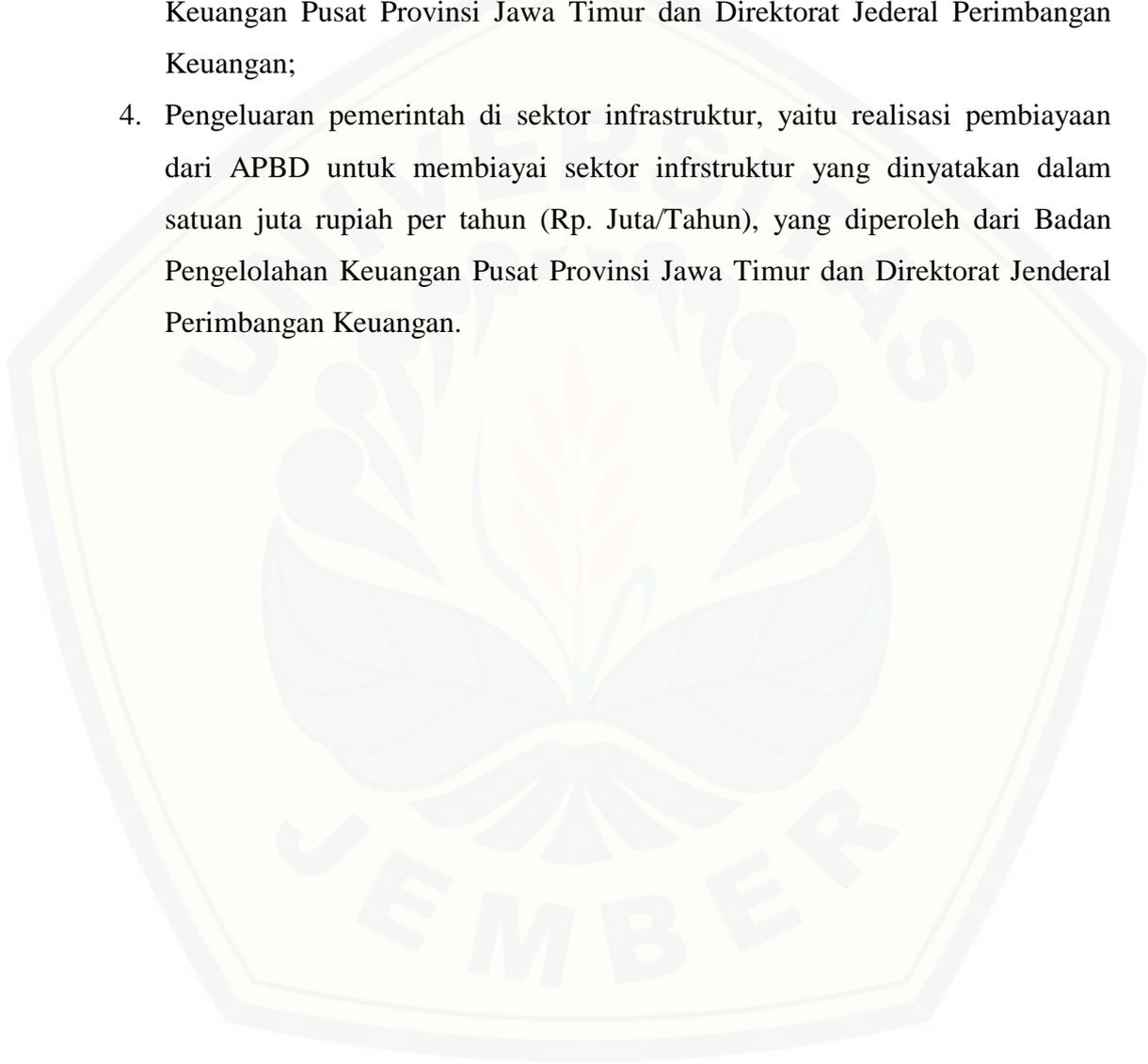
### 3.3 Definisi Variabel Operasional

Definisi variabel operasional merupakan penjelasan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. IPM, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing 11 Kabupaten di Wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dinyatakan dalam satuan persentase (%);
2. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, yaitu realisasi pembiayaan dari APBD untuk membiayai sektor pendidikan yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah per tahun (Rp. Juta/Tahun), yang diperoleh dari Badan

Pengelolaan Keuangan Pusat Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

3. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, yaitu realisasi pembiayaan dari APBD untuk membiayai sektor kesehatan yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah per tahun (Rp. Juta/Tahun), yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Pusat Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
4. Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur, yaitu realisasi pembiayaan dari APBD untuk membiayai sektor infrastruktur yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah per tahun (Rp. Juta/Tahun), yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Pusat Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan penelitian tentang pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dikarenakan terdapat kelemahan dalam penelitian ini, yaitu minimnya tahun penelitian yang dilakukan dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan investasi dalam bidang pendidikan membutuhkan waktu dan proses yang panjang sehingga pengaruh dari adanya investasi di sektor pendidikan dapat dirasakan, dan terlepas dari bentuk usaha pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan, peran serta masyarakat juga merupakan hal yang penting.
2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan merupakan kewajiban pemerintah kepada rakyatnya karena kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan kondisi kesehatan yang baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dan adanya SDM yang berkualitas maka dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien dalam proses pembangunan.
3. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk membentuk SDM yang berkualitas maka kebutuhan fisik masyarakat seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier harus terpenuhi dengan baik. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan fisik seperti perumahan dan fasilitas umum merupakan faktor pendorong kesejahteraan penduduk.

## 5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang diberikan dari hasil penelitian yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus terus menerus meningkatkan alokasi dana pada sektor pendidikan dan diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan pendidikannya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM. Dan pemerintah harus lebih giat berusaha untuk merangkul masyarakat agar bersukarela ikut serta dalam proses pembangunan, karena masyarakat merupakan agen-agen aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan infrastruktur sejauh ini terbukti secara gamblang mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga pemerintah diharapkan terus menjaga kualitas pelayanannya di kedua sektor tersebut melalui peningkatan alokasi dana untuk pembangunan di sektor kesehatan dan infrastruktur.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Tarmizi. 2010. Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal E-Mabis FE-unimal, Volume 11, Nomor 3, Oktober 2010.*
- Arifin, Mochammad Yuli. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. *Artikel Ilmiah Mahasiswa.*
- Astri, Meylina, Nikensari, Sri Indah Dan Kuncara, Harya. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Vol.1 No.1 Issn: 2302-2663.*
- Bappenas. 2015. Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur 2015. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Diakses pada tanggal 10-07-2017.  
<https://jemberkab.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>.
- Cahyono, Hendry. 2012. Pengaruh Belanja Daerah Dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Skripsi.*
- Daryanto. 1996. Kependudukan. Bandung: Tarsito.
- Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Ekananda, Mahyus. 2015. Ekonometrika Dasar Untuk Penelitian Ekonomi, Sosial Dan Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ekananda, Mahyus. 2016. Analisis Ekonometrika Data Panel. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Frisdiantara, Christiea Dan Mukhlis, Imam. 2016. Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis Dan Empiris. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hasyim, Ali Ibrahim. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, Vighar Choirul. 2015. *Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. Skripsi*.
- Kali, Klementius Primus Interparis Bria. 2016. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi-Provinsi Kawasan Indonesia Bagian Timur Periode 2006-2013. Skripsi*.
- Kamaluddin, Rustian. 1999. *Pengantar Ekonomi Pembangunan: Dilengkapi Dengan Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ui.
- Kuncoro, Vicky Kresno. 2016. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Eks Karesidenan Besuki. Skripsi*.
- Kurnianingsih, Titik. *Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)*. Jakarta: Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI.
- Larassita, Yufika Furi. 2016. *Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jember Periode 1990-2014. Skripsi*.
- Lumbantoruan, Eka Pratiwi Dan Hidayat, Paidi. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.2 No.2*.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mirza, S.D. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009. Jurnal Analisis Pembangunan Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Negri Semarang*.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ndraha, Taliziduhu. 2002. Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Patriotika, P Mashita. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. *Skripsi*
- Prijambodo, Bambang. 1995. Teori Pertumbuhan Endogen: Tinjauan Teoritis Singkat Dan Implikasi Kebijaksanaannya. *Perencanaan Pembangunan, No. 03 Desember 1995*.
- Putra, Dwi Adi. 2014. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 1995-2012. *Skripsi*.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. *Ekonomika Publik*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Saputra, Whisnu Adhi. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Ipm, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Skripsi*.
- Sanggalorang, Septian M.M., Rumaté, Vekie A., Dan Siwu, Hanly F.Dj. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 02 – Edisi Juli*.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sun'an, Muammil. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sun'an, Muammil Dan Senuk, Abdurrahman. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suparmoko, M. 1996. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Bpfe-Ugm.
- Syalkahfi, M. Alyuriza. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 1999-2014. *Skripsi*.

- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wardhono, Adhitya. 2012. "Mengenal Ekonometrika, Edisi Pertama". Tidak Diterbitkan. Jember: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Winarti, Astri. 2014. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan Dan Pdb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012. *Skripsi*.
- World Bank. 2007. Bab 3 Sektor Pendidikan: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007. Jakarta: The World Bank Office Jakarta.

**LAMPIRAN A. Data Penelitian**

<b>KABUPATEN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>IPM</b>	<b>PDD</b>	<b>KES</b>	<b>INF</b>
BANYUWANGI	2011	65.48	483158799974	87542163041	138385323325
BANYUWANGI	2012	66.12	764408815169	154968501431	235264834214
BANYUWANGI	2013	66.74	879226032639	188975160985	245389806211
BANYUWANGI	2014	67.31	1012826186085	227524429765	414240929826
PASURUAN	2011	61.43	696630683885	138848114253	108151637310
PASURUAN	2012	62.31	722465793089	163603304571	145927543522
PASURUAN	2013	63.74	747326545074	208137101034	184837798714
PASURUAN	2014	64.35	822957275359	257058057716	294391351265
SITUBONDO	2011	60.82	381095969709	102770234705	78875054826
SITUBONDO	2012	62.23	570091352020	67860084848	72787213673
SITUBONDO	2013	63.43	499532556633	134242422551	124575036034
SITUBONDO	2014	63.91	529042718507	192572686891	190421202483
JEMBER	2011	60.64	877668672839	204163604532	186589907592
JEMBER	2012	61.31	1044400425404	263516115666	231703272635
JEMBER	2013	62.43	1200435473079	303542531070	269074003535
JEMBER	2014	62.64	1145275608823	434932446269	228541080019
PROBOLINGGO	2011	60.30	464212899543	114357615768	145584829447
PROBOLINGGO	2012	61.33	576155998624	131198809418	136031696142
PROBOLINGGO	2013	62.61	636726641223	195087114400	204268772984
PROBOLINGGO	2014	63.04	624791854838	214776313347	148998197084
LUMAJANG	2011	60.72	544505358682	125603547006	108293141592
LUMAJANG	2012	61.31	526126081765	118896284950	97508387169
LUMAJANG	2013	61.87	690459438367	188890981672	149881017482
LUMAJANG	2014	62.33	798641711841	229108136878	149252251848
BONDOWOSO	2011	60.46	446568340631	117389040649	94823445442
BONDOWOSO	2012	62.24	496783110963	126342630715	114072716047
BONDOWOSO	2013	63.21	528420149892	136902317977	162118390057
BONDOWOSO	2014	63.43	554947557928	162854251294	285352530450
PAMEKASAN	2011	60.42	417078085033	93034260990	107454365885
PAMEKASAN	2012	61.21	520655678224	121334938012	129332003829
PAMEKASAN	2013	62.27	571433583464	128640591721	127223988281
PAMEKASAN	2014	62.66	577243168731	148996033186	271021525358
SUMENEP	2011	58.70	487568536411	101915841994	84074030011
SUMENEP	2012	60.08	555358051401	138805893716	95904915585
SUMENEP	2013	60.84	589912295983	143769230417	135895947381

---

SUMENEP	2014	61.43	607574180335	205447442405	178665422052
BANGKALAN	2011	58.63	141220935773	57517431807	153883219071
BANGKALAN	2012	59.65	131148248224	88933725656	111274755594
BANGKALAN	2013	60.19	194854431573	125606892776	155255287462
BANGKALAN	2014	60.71	209135743764	165989519595	173986587417
SAMPANG	2011	55.17	403248070452	80037361706	96966171556
SAMPANG	2012	55.78	415817728010	93173657310	127826164873
SAMPANG	2013	56.45	445198090800	113269382000	144850537083
SAMPANG	2014	56.98	449970998189	159411002803	268106001525

---



**LAMPIRAN B. Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.509875	3	0.9167

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LPDD	1.494742	1.520892	0.107640	0.9365
LKES	1.343829	1.305507	0.007503	0.6582
LINF	0.988349	1.014451	0.003544	0.6610

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 09/20/17 Time: 08:01

Sample: 2011 2014

Periods included: 4

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 44

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-38.80841	16.23200	-2.390857	0.0233
LPDD	1.494742	0.857526	1.743085	0.0916
LKES	1.343829	0.531187	2.529860	0.0169
LINF	0.988349	0.412921	2.393552	0.0231

**Effects Specification**

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.968869	Mean dependent var	61.56614
Adjusted R-squared	0.955378	S.D. dependent var	2.581249
S.E. of regression	0.545258	Akaike info criterion	1.878256
Sum squared resid	8.919188	Schwarz criterion	2.445953
Log likelihood	-27.32163	Hannan-Quinn criter.	2.088785
F-statistic	71.82007	Durbin-Watson stat	1.971227
Prob(F-statistic)	0.000000		

### LAMPIRAN C. Hasil Regresi Berganda Data Panel Menggunakan Random Effect

Dependent Variable: IPM  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 09/13/17 Time: 20:27  
 Sample: 2011 2014  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 11  
 Total panel (balanced) observations: 44  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-39.20198	15.12060	-2.592621	0.0132
LPDD	1.520892	0.792282	1.919633	0.0621
LKES	1.305507	0.524077	2.491058	0.0170
LINF	1.014451	0.408608	2.482700	0.0173

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.491400	0.9543
Idiosyncratic random		0.545258	0.0457

Weighted Statistics			
R-squared	0.732062	Mean dependent var	6.697085
Adjusted R-squared	0.711967	S.D. dependent var	0.983838
S.E. of regression	0.528013	Sum squared resid	11.15192
F-statistic	36.42946	Durbin-Watson stat	1.581362
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.310800	Mean dependent var	61.56614
Sum squared resid	197.4575	Durbin-Watson stat	0.089312

**LAMPIRAN D. Hasil Uji Asumsi Klasik****1. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS**

Dependent Variable: RESABS  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 09/13/17 Time: 20:48  
 Sample: 2011 2014  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 11  
 Total panel (balanced) observations: 44  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.266837	12.01793	0.604666	0.5488
LPDD	-0.015232	0.622979	-0.024450	0.9806
LKES	-0.499088	0.451791	-1.104688	0.2759
LINF	0.291281	0.353474	0.824051	0.4148

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.311361	0.8823
Idiosyncratic random		0.478863	0.1177

Weighted Statistics			
R-squared	0.040326	Mean dependent var	0.274574
Adjusted R-squared	-0.031649	S.D. dependent var	0.484390
S.E. of regression	0.491995	Sum squared resid	9.682378
F-statistic	0.560276	Durbin-Watson stat	1.607386
Prob(F-statistic)	0.644347		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.040832	Mean dependent var	1.528697
Sum squared resid	90.76910	Durbin-Watson stat	0.171461

**2. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS**

	LPDD	LKES	LINF
LPDD	1	0.7116753730489682	0.4138654875381295
LKES	0.7116753730489682	1	0.682984976589811
LINF	0.4138654875381295	0.682984976589811	1

### 3. HASIL UJI NORMALITAS

